

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi Sumberdaya daya alam terbesar di Asia Tenggara dengan kondisi perekonomian yang dinamis dan beragam. Ekonomi Indonesia telah mengalami pertumbuhan selama beberapa dekade terakhir, meskipun dihadapkan pada tantangan-tantangan internal dan eksternal seperti fluktuasi harga komoditas, ketidakstabilan politik, dan pandemi global. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan peningkatan yang positif dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus meningkat, pertumbuhan PDB Indonesia pada tahun 2023 sebesar 5,04%, Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, dan kinerja ekspor yang stabil.

Namun, di balik angka-angka makro ekonomi yang menjanjikan, terdapat tantangan signifikan yang harus dihadapi. Ketimpangan ekonomi masih menjadi isu utama, dengan disparitas pendapatan yang tinggi antara kelompok kaya dan miskin, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indeks Gini Rasio Indonesia pasca covid di tahun 2021 dan 2022 stabil pada 0,381 dan walaupun terjadi peningkatan posistif pada tahun 2023 menjadi 0,375 namun masih dibawah angka harapan, sehingga penguatan pada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi hal yang sangat penting untuk di

prioritaskan karena lebih banyak menyentuh golongan masyarakat menengah ke bawah.

Koperasi merupakan sebuah lembaga yang menunjang perekonomian masyarakat dan langsung bersentuhan dengan masyarakat kalangan menengah kebawah, Koperasi disebutkan sebagai organisasi ekonomi untuk kesejahteraan sosial milik para anggota dan diimplementasikan sebagai pihak yang dapat melakukan pemerataan pendapatan. koperasi merupakan suatu badan usaha, sehingga dalam pelaksanaan usahanya koperasi tetap tunduk terhadap kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. koperasi diharapkan dapat berperan penting dalam perekonomian Indonesia sehingga koperasi dapat menjadi soko guru perekonomian di Indonesia.

Koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang dan telah berkembang menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional. didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui usaha bersama yang berlandaskan pada nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas. Koperasi di Indonesia tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya, tetapi juga dalam memperkuat ekonomi lokal, mendukung pembangunan pedesaan, dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi.

Kualitas kelembagaan koperasi yang baik akan menciptakan koperasi yang sehat berkualitas serta berdaya saing, selanjutnya koperasi akan lebih berperan dan memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan pada

pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya Provinsi Jawa Barat. Koperasi yang sehat dan berdaya saing dapat menjadi katalisator untuk pembangunan ekonomi di Indonesia, Pelaksanaan Rapat Anggota oleh Koperasi setiap tahunnya dapat dianggap sebagai indikator positif terhadap kualitas kelembagaan koperasi

Rapat Anggota (RA) merupakan perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan kewajiban setiap koperasi yang merupakan implementasi pelaksanaan Demokratisasi Pengelolaan Koperasi yang minimal dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, oleh karena itu Rapat Anggota Tahunan juga merupakan wujud dari pertanggung jawaban pengurus dan pengawas kepada anggota atas kinerjanya, Pelaksanaan RAT diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus, dan pengawas, yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar, RAT dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 bulan setelah tutup buku.

Dalam Undang-Undang RI No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Bab VI Pasal 22 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan :

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.**
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.**

Unsur-unsur manajemen merupakan komponen yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi karena unsur ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan pelaksanaan RAT tersebut berjalan dengan lancar, efektif, dan transparan. Keberhasilan sebuah RAT sangat bergantung pada perencanaan yang baik, pengorganisasian yang tepat, dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat. Unsur-unsur seperti *man* (manusia), *money* (uang), *methods* (metode), *materials* (material), *machines* (mesin/alat), *markets* (pasar), dan *minute* (waktu) membantu mencakup semua aspek penting dalam pengelolaan dan pelaksanaan RAT. Dengan adanya manajemen yang terstruktur, pengurus koperasi dapat menjalankan peran mereka secara maksimal, mulai dari persiapan dokumen hingga penyampaian laporan dan pengambilan keputusan. Manajemen yang baik memastikan bahwa informasi disajikan dengan transparan, keputusan diambil berdasarkan data yang akurat, dan setiap langkah diambil berorientasi pada kepentingan anggota.

Penerapan metode dan prosedur yang jelas juga membantu menghindari konflik dan misinterpretasi, memastikan bahwa setiap anggota memiliki kesempatan yang adil untuk memberikan kontribusi. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas Pengurus tetapi juga membangun kepercayaan dan partisipasi aktif dari Anggota, yang merupakan esensi dari demokrasi dalam koperasi. Dengan demikian, penerapan unsur-unsur manajemen dalam RAT menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama, menjaga stabilitas organisasi, dan merencanakan langkah-langkah strategis Pencapaian tujuan Koperasi.

Kedudukan Pengurus sebagai pemegang mandat dari Rapat Anggota berkewajiban untuk mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada anggota. Dalam RAT, pengurus menyampaikan laporan tahunan yang mencakup laporan keuangan, kegiatan, dan rencana kerja koperasi. RAT juga menjadi forum utama untuk pengambilan keputusan strategis, seperti pemilihan Pengurus dan Pengawas baru, persetujuan kebijakan, dan pembagian sisa hasil usaha (SHU). Kewajiban ini bertujuan memastikan bahwa semua anggota memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan koperasi, mengawasi kinerja pengurus, dan memberikan masukan untuk keberlanjutan koperasi.

Tren kepatuhan koperasi dalam melaporkan hasil pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan di provinsi Jawa Barat dinilai cukup rendah, jumlah koperasi yang melaporkan hasil pelaksanaan rapat anggota tahunan tidak sebanding dengan jumlah koperasi aktif di Jawa Barat. Sebagian koperasi mungkin telah melaksanakan kewajiban pelaporan ini dengan baik, sementara yang lain mungkin menghadapi tantangan dalam implementasinya. Kepatuhan koperasi dalam melaporkan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan kepada Pemerintah merupakan hal mutlak yang wajib dilakukan oleh setiap koperasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pengendalian yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah.

Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi ke dua yang memiliki populasi jumlah koperasi terbanyak di Indonesia setelah Jawa Timur. Berdasarkan data dari *Online Data System (ODS)* Kementerian Koperasi dan UKM Republik

Indonesia per 30 Desember 2023 jumlah Koperasi di Jawa Barat sebanyak 32.152 Unit Koperasi untuk tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten /Kota, namun dari segi kualitas kelembagaan koperasi masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari jumlah koperasi yang melaporkan RAT tahun buku 2022 secara keseluruhan sebanyak 2.589 Unit atau 8,05 % saja.

Tabel 1.1 Data Koperasi Primer Tingkat Provinsi Jawa Barat periode 30 Desember 2023

No	Jenis Koperasi	Aktif	Non Aktif	Jumlah
1	Produsen	192	121	313
2	Konsumen	742	198	940
3	Jasa	183	313	496
4	Pemasaran	62	4	66
5	Simpan Pinjam	358	41	399
Jumlah		1.537	676	2.213

Sumber Data ODS Koperasi Kemenkop UKM RI

Kategori Koperasi aktif merupakan koperasi yang berstatus memenuhi kewajiban laporan RAT pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dan Koperasi baru yang berdasarkan data masih tercatat aktif 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak pendirian walaupun tidak ada riwayat pelaporan pada dinas, sedangkan Koperasi dengan status tidak aktif merupakan koperasi yang tidak melaporkan lebih dari 3 tahun berturut-turut sejak pendirian dan berdasarkan hasil identifikasi lapangan tidak terdapat operasional pada koperasi.

Berdasarkan data diatas periode 30 Desember 2023 menunjukkan bahwa jumlah koperasi primer yang wilayah keanggotaanya lintas Kabupaten/ Kota

dalam satu wilayah Provinsi Jawa Barat berjumlah 2.213 Unit Koperasi, dengan jumlah koperasi berstatus aktif sebanyak 1.537 Unit Koperasi atau 69,5 % dan yang berstatus tidak aktif sebanyak 676 Unit Koperasi atau 30,5 % dan jumlah koperasi paling banyak adalah jenis koperasi konsumen dengan jumlah 742 unit Koperasi Aktif dan 198 unit koperasi non aktif dimana jumlah koperasi tersebut tersebar di 27 Kabupaten /Kota se Provinsi Jawa barat.

Jumlah Koperasi yang melaporkan hasil pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan yang disampaikan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat masih dinilai cukup rendah dibandingkan dengan jumlah koperasi berstatus aktif yang ada, hal ini menunjukkan kepatuhan koperasi dalam melaporkan RAT masih di luar harapan Pemerintah, sehingga perlu dilakukan upaya evaluasi yang bertujuan dalam merumuskan kebijakan pembinaan yang tepat kepada koperasi dalam upaya meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan RAT secara rutin setiap tahunnya.

Tabel 1.2 Data Tren Keragaan RAT Koperasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 sampai 2023

No	Tahun	Koperasi			RAT	% dari Koperasi Aktif
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah		
1	2018	262	661	923	131	50,00
2	2019	593	655	1.248	177	29,84
3	2020	939	650	1.586	258	27,47
4	2021	1.170	653	1.823	296	25,30
5	2022	1.406	657	2.063	264	18,77
6	2023	1.537	676	2.213	286	18,61

Sumber Data Keragaan Dinas KUK Prov Jabar - ODS Koperasi Kemenkop UKM RI

Berdasarkan data keragaan Dinas Koperasi dan usaha kecil provinsi Jawa Barat dari tahun 2018 sampai 2022, Koperasi tingkat Provinsi Jawa Barat secara

jumlah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun apabila dilihat dari segi kepatuhan koperasi dalam melaksanakan RAT tidak sebanding dengan jumlah pertumbuhan koperasi, bahkan apabila dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif trennya cenderung menurun setiap tahunnya, hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan koperasi tingkat provinsi Jawa Barat dalam melaporkan RAT masih rendah.

Tabel 1.3 Data Pelaporan RAT Koperasi Primer Tingkat Provinsi Jawa Barat berdasarkan Jenis Usaha periode 30 Desember 2023

No	Jenis Koperasi	Jumlah	Jumlah RAT 2023	
1	Produsen	313	13	4,15%
2	Konsumen	940	123	13,08%
3	Jasa	496	16	3,22%
4	Pemasaran	66	3	4,54%
5	Simpan Pinjam	398	118	29,65%
Jumlah		2.213	273	12,34%

Sumber Data ODS Koperasi Kemenkop UKM RI

Berdasarkan data diatas, periode 30 Desember 2023 menunjukkan bahwa Koperasi primer dengan wilayah keanggotaan Lintas Kabupaten / Kota dalam satu wilayah provinsi Jawa Barat yang sudah memenuhi kewajibannya untuk melaporkan hasil pelaksanaan RAT pada tahun buku 2022 sebanyak 273 Unit Koperasi atau hanya 12,34% dari total jumlah Koperasi primer tingkat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan jenis Usaha.

**Tabel 1.4 Data Pelaporan RAT Koperasi Tingkat Provinsi Jawa Barat
Tahun Badan Hukum 2019 - 2022 periode 30 Desember 2023**

No	Tahun Badan Hukum	Jumlah Koperasi (unit)	Jumlah RAT 2023	
1	2019	151	9	5,96%
2	2020	211	27	12,80%
3	2021	185	28	15,14%
4	2022	166	15	9,04%
Jumlah		713	79	11,08%
Jumlah Aktif		1.537	273	17,76%

Sumber Data ODS Koperasi Kemenkop UKM RI

Berdasarkan data diatas, periode 30 Desember 2023 diketahui tingkat kepatuhan Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas kabupaten / kota dalam satu wilayah Provinsi Jawa Barat untuk tahun Badan Hukum 2019 sampai 2022 dengan jumlah koperasi sebanyak 713 Unit Koperasi yang berstatus Aktif atau 46,39% dari total jumlah koperasi aktif, yang memenuhi kewajibannya untuk melaporkan hasil pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan sebanyak 79 Unit Koperasi atau 11,08% dari jumlah Koperasi Aktif tahun Badan Hukum 2019 sampai 2022 tingkat Provinsi Jawa barat.

Pelaksanaan RAT yang baik tidak terlepas dari penerapan prinsip-prinsip manajemen yang efektif. Manajemen dalam konteks koperasi, mencakup serangkaian fungsi manajemen yang di dalamnya terdiri dari unsur manajemen, Setiap Unsur ini memainkan peran yang vital dalam memastikan bahwa seluruh proses dalam pelaksanaan RAT dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang diharapkan.

penelitian yang akan dilaksanakan ini bertujuan untuk merumuskan permasalahan sesuai dengan fenomena yang tersajikan dalam data, mengenai

kondisi Koperasi tingkat Provinsi Jawa Barat dalam memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan. Penting untuk diketahui unsur manajemen dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan pada koperasi konsumen tingkat provinsi Jawa Barat, karena hal ini akan berdampak pada kualitas kelembagaan koperasi serta dalam upaya mengoptimalkan peran pemerintah dalam merumuskan strategi kebijakan pembinaan perkoperasian yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, sehingga Penelitian Thesis ini mengangkat judul **“Pengaruh Unsur-unsur Manajemen terhadap Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi”**, studi kasus pada Koperasi Konsumen dengan wilayah Keanggotaan lintas Kabupaten/Kota dalam satu Wilayah Provinsi Jawa Barat

1.2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Unsur-unsur Manajemen secara Parsial mempengaruhi Koperasi Konsumen tingkat Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan
2. Bagaimana Unsur-unsur Manajemen secara Simultan mempengaruhi Koperasi Konsumen tingkat Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan
3. Bagaimana Upaya Manajerial yang harus dilakukan oleh Koperasi untuk dapat melaksanakan Kewajiban Rapat Anggota Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Unsur-unsur Manajemen

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu memberikan gambaran Unsur-unsur Manajemen dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Koperasi dan Hasil penelitian ini berkemungkinan untuk dapat digunakan oleh Koperasi untuk melakukan upaya perbaikan dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunannya.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Beberapa Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Unsur Manajemen yang meliputi *Men* (manusia), *Money* (uang), *Method* (proses), *Material* (material/bahan), *Machine* (mesin), *Market* (pasar), *Minute* (Waktu) yang mempengaruhi Koperasi Pelaksanakan Rapat Anggota Tahunan secara Parsial;
2. Unsur Manajemen yang meliputi *Men* (manusia), *Money* (uang), *Method* (proses), *Material* (material/bahan), *Machine* (mesin), *Market* (pasar), *Minute* (Waktu) yang mempengaruhi Koperasi Pelaksanakan Rapat Anggota Tahunan secara Simultan;
3. Upaya Manajerial berdasarkan Unsur-unsur Manajemen yang meliputi *Men* (manusia), *Money* (uang), *Method* (proses), *Material* (material/bahan), *Machine* (mesin), *Market* (pasar), *Minute* (Waktu) dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan;

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Ilmu Manajemen

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan kajian baru yang dapat memberikan kontribusi positif serta manfaat bagi pengembangan ilmu manajemen, Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat membantu mengidentifikasi model manajemen yang efektif dalam pengelolaan Koperasi yang termasuk didalamnya optimalisasi peran dari perangkat organisasi koperasi yaitu Rapat Anggota sebagai forum untuk pengambilan keputusan dan strategi manajemen yang paling sesuai untuk mendukung keberhasilan koperasi

2. Ilmu Perkoperasian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan kajian baru yang dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar koperasi, Hal ini mencakup aspek-aspek Tata Kelola Koperasi, partisipasi anggota, dan tujuan sosial ekonomi koperasi selain itu penelitian ini diharapkan dapat memunculkan konsep-konsep baru yang dapat memperkaya kerangka kerja teoritis di bidang perkoperasian, Ini bisa mencakup inovasi dalam konsep kepemilikan bersama, tanggung jawab sosial dan Demokratisasi Pengelolaan Koperasi

1.4.2. Kegunaan Praktis / Guna Laksana

1. Bagi Koperasi Tingkat Provinsi Jawa Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap Koperasi tingkat Provinsi Jawa Barat dalam mempersiapkan Rapat Anggota Tahunannya, melalui gambaran faktual Unsur Manajemen yang mempengaruhi Koperasi dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, akan memunculkan kiat dan strategi koperasi agar dapat meningkatkan kualitas kelembagaanya dalam memenuhi kewajibannya untuk Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan secara Rutin setiap Tahunnya

2. Bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Penelitian ini juga diharapkan memberikan gambaran faktual mengenai Kondisi koperasi dalam Unsur Manajemen yang mempengaruhi Koperasi dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, serta menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan pada Koperasi tingkat Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.